

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Di studi ini, penulis merujuk pada pedoman studi sebelumnya yang relevan sesuai topik subjek penelitian. Referensi ini digunakan sebagai acuan yang sesuai dan membedakan penelitian ini dari riset-riset dahulu. Beberapa studi sebelumnya yang diduga berhubungan untuk studi ini meliputi.

*Pertama, merujuk pada penelitian Rahman 2018 dalam jurnalnya dengan judul “Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan”* membahas pengertian politik yang memiliki makna cukup beragam, mulai dari pengertian politik menurut Sitepu, 2012 yang merupakan suatu proses dan sistem yang terkait erat dengan partisipasi warga dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan. Tipe-tipe budaya politik juga dibahas dalam jurnal ini meliputi sikap politik lokal (*politic culture*), budaya politik subyek (*subject political culture*), budaya politik partisipan (*participant political culture*). Pendidikan kewarganegaraan menjadi konsep dasar sebagai sarana pemahaman terhadap politik di lingkungan sekolah bagi pemilih pemula. Dalam jurnal ini, terdapat tiga metode yang dipakai untuk mengevaluasi tindakan pemilih, yaitu (a) Perspektif sosial (b) Psikologis, dan (c) Rasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan rasional, yang mengacu pada pertimbangan keuntungan dan kerugian dalam pemilihan partai atau calon pemimpin. Terutama, pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah siswa akan memilih atau tidak memilih dalam pemilihan. Metodologi yang diterapkan dalam riset ini mirip, keduanya mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya riset ini mengupas mengenai pemahaman politik bagi pemilih pemula ditingkat sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan sedangkan peneliti membahas mengenai pendekatan yang diterapkan oleh KPU terhadap peningkatan keikutsertaan pemilih pemula di Kabupaten Sumenep pada pemilu tahun 2024.

*Kedua, hasil dari penelitian jurnal Ardiani et al. 2019 yaitu, strategi yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Ngawi Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan*

Panitia Pemungutan Suara ini menerapkan prinsip-prinsip dari Candler, Scroder, dan Newman Seth yang mana dalam strateginya menentukan tujuan dan sasaran terlebih dahulu untuk pemilih awal yang cerdas, KPU Kabupaten Ngawi menerapkan strategi penyerangan dengan intensitas tinggi dalam melakukan kampanye tidak melalui perantara dan melalui penerata sepanjang proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Selain menggunakan strategi menyerang KPU Kabupaten Ngawi juga menerapkan strategi bujukan yaitu berinteraksi dengan masyarakat melalui beragam aktivitas dan juga mengadakan debat diskusi antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018. Perbedaan antara riset sebelumnya dengan riset yang nanti peneliti jalankan adalah berada di praktek komunikasi masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ngawi sedangkan penulis lebih berfokus pada strategi KPUD Sumenep di pemilu (pemilihan umum) tahun 2024. Kesamaan dalam penelitian ini adalah bahwa keduanya mendiskusikan strategi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

*Ketiga*, karya akademis yang ditulis oleh Muhazir, Miranti, and Sayidatina 2023 dengan judul “Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024” menjelaskan penyampaian strategi KPU Banyumas dengan cara komunikasi politik melalui berbagai metode, mulai dari perencanaan, penyampaian pesan, hingga pengelolaan media komunikasi politik. Untuk mengidentifikasi masalah dan pesan yang menjadi target komunikasi politik, KPU Kabupaten Banyumas melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan mengadakan diskusi terfokus dengan berbagai pemangku kepentingan. Diskusi yang terfokus tersebut melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat di Banyumas, serta tidak terkecuali mengikutsertakan partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan lainnya termasuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, meskipun masih banyak pandangan negatif dari masyarakat mengenai kegiatan kunjungan kerja ini. Ada kesamaan antara penelitian terbaru ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti minat untuk memahami lebih lanjut mengenai strategi yang digunakan KPU dalam mendorong partisipasi politik pemilih pemula. Namun, terdapat juga beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya,

terutama terkait subjek dan metode yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metodologi penelitian kualitatif.

*Keempat*, tujuan penelitian dari jurnal “Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020” karya Meyliana et al. 2020 yaitu ini berfokus pada mengukur partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja dalam Pilkada serentak tahun 2020. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari 19 kecamatan, 47 kelurahan, dan 112 desa dan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh keluarga, agama, dan kedudukan sosial menjadi pemicu partisipasi politik masyarakat Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja telah mengadakan Pemilihan Bupati sebanyak tiga kali, yaitu pada Pilkada 2005 dengan partisipasi mencapai 77,6%, Pilkada 2010 dengan partisipasi sebesar 78,7%, dan Pilkada 2015 dengan partisipasi hanya 71,7%. Hasil rekapitulasi ini menunjukkan bahwa partisipasi pada Pemilihan Bupati Tana Toraja tahun 2015 cukup baik, meskipun terjadi penurunan dalam tiga periode penyelenggaraan Pemilihan Bupati tersebut. Pilkada Tana Toraja tahun 2020 di masa pandemi diperkirakan akan menyebabkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Menurut penulis, berbagai pendapat dari pemerhati pemilu mengasumsikan bahwa masyarakat takut datang ke TPS karena jumlah kasus Covid-19 belum menurun. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengatasi permasalahan melalui observasi langsung manusia berdasarkan tanda-tandanya. Metode pengumpulan data melibatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berasal dari KPUD Tana Toraja, organisasi semu politik Banteng Muda Indonesia, dan Pengamat Politik Tana Toraja. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui kutipan dari buku, jurnal, dokumen, media daring, serta sumber lainnya. Penelitian ini mirip dengan studi sebelumnya dalam hal menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pembahasan tentang kebijakan KPU dalam mendorong partisipasi politik pemilih pemula. Perbedaan utamanya terletak pada penelitian sebelumnya membahas terkait Pilkada sedang pada karya penulis yang baru ini membahas tentang Pemilu tahun 2024 dan perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.

*Kelima*, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018” Sa’ban, Sadat, and Nastia 2019. Masyarakat Kota BauBau turut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 27 Juni 2018 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih di Kota BauBau mencapai 106.947 orang. Tingkat partisipasi masyarakat Kota BauBau cukup tinggi dengan persentase jumlah pemilih sebesar 69,87% (76.821 orang), sedangkan sisanya yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 30,13% (30.133 orang). Adanya pembentukan relawan demokrasi yang mana relawan demokrasi berperan sebagai mitra KPU dalam melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih di tingkat kabupaten/kota. Bentuk partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk secara optimal menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan dan pencarian data secara online, serta melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota BauBau yang kompeten dalam menjawab masalah politik. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, seperti penggunaan metodologi kualitatif deskriptif dan pembahasan mengenai kebijakan KPU yang mendorong partisipasi pemilih pemula dalam politik. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

*Keenam*, Skripsi yang disusun oleh Lestari 2019 “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang” terletak pada pembentukan sebuah inisiatif Relawanrisasi yang terdiri dari 25 individu, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran publik serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih. Distingusi antara riset yang telah disebutkan dan riset yang segera dilakukan oleh penulis adalah terletak pada taktik politik yang diterapkan di daerah tempat diadakannya pemilu dan strategi kebijakan yang diterapkan di kpu daerah yang juga berbeda. Karakteristik utama dari studi ini adalah penerapan pendekatan penjelasan secara naratif yang berkualitas. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada teknik

komunikasi, penelitian ini lebih difokuskan pada strategi yang diterapkan oleh KPU. Perbedaan lainnya terletak pada pendekatan komunikasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, di mana menggunakan strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswell, sedangkan penelitian ini tidak. Meskipun demikian, terdapat kesamaan antara kedua penelitian dalam hal fokus pada partisipasi pemilih pemula.

*Ketujuh*, penelitian “Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia” oleh Zulkarnaen, Adara, and Rahmawati 2020 dalam penelitiannya, penulis menerapkan pendekatan studi literatur dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam bentuk tulisan, termasuk hasil penelitian yang belum dipublikasikan. Hal ini karena studi literatur memiliki peran yang penting dalam setiap penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti literatur, untuk kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis setelah dilakukan proses membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Dengan kekuatan yang signifikan, generasi milenial bisa menjadi sasaran utama strategi pemasaran dari tim pendukung setiap pasangan calon. Kekurangan informasi yang valid dan keberadaan berita palsu yang masih meluas di berbagai platform media massa, dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih milenial. Hal ini menyebabkan banyak spekulasi yang muncul, mengurangi motivasi generasi milenial yang memiliki hak pilih karena mereka masih ragu tentang setiap calon yang diajukan. Di samping itu, variasi pola komunikasi yang berbeda di setiap daerah menjadi tantangan bagi tim sukses yang harus memahami pola komunikasi dan adat setiap daerah target kampanye agar diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Meskipun begitu, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Secara khusus, pendekatan penelitian pada studi sebelumnya tidak dijelaskan dengan jelas, dan penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, yang mengakibatkan perbedaan subjek dan objek penelitian secara alami.

*Kedelapan*, penelitian berikutnya dari Perangin-angin and Zainal 2019 yang berjudul "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial" menunjukkan peningkatan penggunaan media sosial di kalangan pemilih pemula. Penelitian ini difokuskan pada pemilih pemula yang baru pertama

kali menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2014. Sampel dipilih secara sengaja di tiga kota metropolitan di Indonesia, yakni Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Bandung dan Surabaya dipilih karena keduanya adalah ibu kota provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak pada Pemilu 2014. Selain itu, ketiga kota ini memiliki beberapa perguruan tinggi dengan reputasi yang baik. Di Bandung, contohnya, universitas yang dipilih adalah ITB, UNPAS, dan UNPAD. Para pemilih pemula cenderung menggunakan media sosial untuk berinteraksi sosial (jejaring sosial) dan memperkuat jaringan sosial yang sudah ada di dunia nyata, bukan untuk membentuk jaringan baru. Penelitian tersebut memiliki karakteristik kualitatif dan menerapkan pendekatan tanya-jawab dengan naasumber serta diskusi terarah sebagai alat pengumpulan data. Fokus penelitian tersebut terletak pada hubungan hubungan sosial atau platform media sosial pemilih awal di konteks politis, yang sejalan dengan tema penelitian ini. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitiannya yang beragam dan fokus yang diangkat terkait anak-anak generasi saat ini telah mengadopsi media sosial secara luas dan besar-besaran karena melalui platform tersebut, mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan nyaman tanpa perlu menampilkan aspek-aspek pribadi mereka secara langsung sedangkan topik yang diangkat oleh penulis terkait strategi KPUD Sumenep yang mana juga mengungkana media sosial dalam hal meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, yang menyebabkan asumsi bahwa objek dan subjek penelitiannya juga berbeda.

*Kesembilan*, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan)” oleh Arif and Mulyana 2020, Partisipasi pemilihan umum di Kecamatan Ternate Selatan masih di bawah target yang diharapkan oleh KPU, yakni sebesar 75.5%. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 53.539 jiwa, tetapi hanya 36.653 yang menggunakan hak pilih, mencapai persentase 67.43%. Situasi ini mencerminkan bahwa proses pemilihan di Kecamatan Ternate Selatan, dari persiapan hingga pelaksanaannya, belum mencapai harapan. Terutama, partisipasi masyarakat di Kelurahan Bastiong Talangame hanya mencapai 45.05%. Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melaksanakan wawancara terstruktur dengan 10 narasumber,

termasuk Camat Ternate Selatan, Ketua KPU Kota Ternate, Komisioner KPU Kota Ternate, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda, RT/RW, Petani, dan Pedagang. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tetapi, jika studi sebelumnya mempertimbangkan tingkat keterlibatan politik masyarakat Ternate Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi KPU untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang sedikit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utamanya terletak pada objek dan subjek penelitiannya.

*Kesepuluh*, “Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019” karya ilmiah Novita and Fitri 2020, Metode yang digunakan oleh KPU Kota Bekasi dalam mengedukasi pemilih adalah dengan memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula, khususnya pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sepadan, melalui kerjasama dengan Pemilih Pemula. Penggunaan sumber daya ditingkatkan melalui beberapa langkah, seperti memperkuat struktur kelembagaan KPU dan penyelenggara, menyediakan bimbingan teknologi, menjalin koordinasi yang rutin antara komisioner dan sekretariat, serta berkolaborasi dengan KPU Kota Bekasi. Dalam dimensi pemanfaatan teknologi informasi, upaya dilakukan dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, memperkenalkan rumah pintar pemilu, dan mengelola laman di media sosial. Informasi utama dalam penelitian ini diperoleh melalui dialog mendalam dengan narasumber, termasuk para Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Bekasi, perwakilan Partai Politik, dan juga pemilih milenial yang tinggal di Kota Bekasi. Ada beberapa persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terkait strategi KPU untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula. Kedua penelitian tersebut mengeksplorasi strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Namun, perbedaan kecil terletak pada fokus khusus kedua penelitian tersebut. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengungkap strategi KPUD Sumenep dalam meningkatkan

partisipasi pemilih pemula dalam politik. Perbedaan ini menyoroti variasi dalam subjek dan tujuan penelitian.

Penelitian sebelumnya yang relevan memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam merancang penelitian ini. Hal ini membantu dalam memahami temuan yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya, serta memberikan perbandingan dan gambaran yang mendukung pengembangan penelitian selanjutnya.

## **2.2 Kajian Teori**

Dasar teoretis adalah kumpulan konsep-konsep sesuai yang bisa dipergunakan guna menerangkan variabel yang akan diselidiki. Sebagai landasan, teori-teori ini menjadi dasar untuk menyusun jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan (hipotesis) dan merancang instrumen penelitian. Variabel yang menjadi fokus penelitian dapat diterangkan melalui definisi yang teliti, deskripsi yang komprehensif, dan pembahasan mendalam yang bersumber dari berbagai literatur. Dalam proses ini, peneliti akan secara teratur menjelaskan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan variabel yang sedang diuji, merinci kerangka berpikir, serta menyusun hipotesis penelitian.

### **2.2.1 Strategi**

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang sangat krusial, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh mengadopsi taktik istimewa guna menggalakkan keterlibatan kelompok warga (Gleko, Suprojo, and Lestari 2019). Skema yakni suatu upaya yang diambil oleh pribadi atau entitas untuk meraih sasaran dengan tindakan seperti menetapkan maksud dan target jangka panjang, menggunakan sejumlah langkah, dan juga mengelola aset yang dibutuhkan untuk meraih sasaran tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, implementasi tindakan yang terarah, dan pengelolaan efektif terhadap perangkat yang dibutuhkan agar arahan tersebut dapat tercapai (Salusu 2018). Arifin (2004) menyampaikan pandangan lain bahwa strategi menjadi dasar bagi sasaran organisasi, strategi pelaksanaan, dan metode manajemen dalam meraih target. Strategi juga bisa diartikan menjadi bagian dari rencana menyeluruh, selaras yang menghubungkan keuntungan strategis melalui peluang dan gelagak yang berasal



dari lingkungan eksternal. Tidak sejalan dengan Effendi (2016: 32), strategi dapat diartikan sebagai proses tata kelola dan manajemen yang bertujuan meraih suatu sasaran dan hanya bisa diraih dengan penerapan strategi pelaksanaan. Dalam konteks skema , perlu melibatkan seluruh aspek yang diperlukan demi memahami cara berinteraksi dengan audiens target sehingga dapat memberikan manfaat berdasarkan perspektif mereka. Selain itu, strategi tersebut juga harus mempertimbangkan bagaimana audiens target yang luas bisa diakses dengan efisien.

Menurut definisi di atas, bisa disarikan bahwa strategi adalah sebuah rangkaian persiapan dan langkah-langkah yang dirancang, dipersiapkan guna menghasilkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kekuatan, kekurangan yang dipunyai. Strategi juga dapat dikonsepsikan sebagai proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah diatur sebelumnya, yang dilakukan dalam batas waktu yang sudah diputuskan (Agung Nugroho 2019).

Asal-usul kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yakni "strategia," yang memiliki arti keterampilan atau pengetahuan dalam menjadi seorang panglima. Dalam konteks ini, strategi juga bisa dipahami sebagai suatu skema untuk mengembangkan serta memanfaatkan kekuatan angkatan bersenjata di wilayah-wilayah khusus dengan tujuan mendapat suatu target atau sasaran (Triciptono, 2006:3). Untuk mencapai sasaran, tujuan, dan misi suatu organisasi, organisasi tersebut mengadopsi berbagai aliran maupun jenis strategi. Mengikuti isi dalam Salusu (Salusu 2018) strategi-strategi ini terdiri dari sejumlah jenis:

- a. Strategi organisasi, atau yang dikenal sebagai strategi korporat, terkait dengan pembuatan peran, sasaran, prinsip, dan langkah-langkah upaya strategis yang baru.
- b. Strategi program, atau dikenal sebagai strategi program, menitikberatkan konsekuensi-konsekuensi strategis sebuah tindakan khusus.
- c. Strategi dukungan sumber daya (resources support strategy) merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu performa organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang esensial yang tersedia.

- d. Strategi kelembagaan (institutional strategy) menitikberatkan pada pengembangan kapabilitas organisasi dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategis.

Definisi strategi menunjukkan sesungguhnya bukan hanya terkait melalui rancangan serta langkah-langkah, melainkan terkait dengan kedudukan yang ingin dicapai, langkah, dan prosedur yang dibutuhkan.

#### **A. Tujuan Strategi**

Berdasarkan pendapat (Bambang 2005), penyusunan rencana taktis merujuk pada rangkaian tahapan perencanaan tindakan secara berurutan yang memiliki maksud untuk mencapai tujuan serta pandangan organisasi, yang meliputi:

- a. Mengenali atau menegerti konteks eksternal perusahaan pada era mendatan juga menetapkan tujuan dan tugas perusahaan untuk mencapai sasaran bersama.
- b. Mengadakan evaluasi bagian dalam dan bagian luar organisasi dengan tujuan mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan, juga potensi dan risiko yang bisa terjadi timbul di masa depan yang bisa menghambat pencapaian misi perusahaan.
- c. Menyusun dan merencanakan aspek-aspek penentu keefektifan (*key success factors*) dari strategi yang telah dibuat pada fase evaluasi.
- d. Menetapkan indikator mengkaji tujuan sasaran mengevaluasi, dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
- e. Menentukan langkah yang tepat agar mencapai sasaran dalam waktu dekat dan jangka panjang.

#### **B. Tingkatan Strategi**

Wheelen dan Hunger (1990) memahami 3 tingkatan strategi, yakni:

- a. Strategi korporat  
Terkait interaksi organisasi dengan asosiasi. Masyarakat dianggap sebagai kelompok yang berada di luar kendali organisasi.
- b. Strategi korporat

Strategi ini terkait dengan misi organisasi, dikenal juga sebagai Strategi Besar, mencakup berbagai aspek terkait dengan suatu formasi.

c. Strategi bisnis

Menjelaskan langkah organisasi dapat memperoleh pangsa pasar atau mengatur harga di tengah masyarakat umum.

### C. Perencanaan Strategis

Chandler (dalam Salusu 2015: 64) menyebutkan beberapa strategi perencanaan yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan dengan baik. Salah satunya adalah:

a. Perumusan dan target jangka panjang

Fase penyusunan ini menekankan keselarasan penyusunan, yang mencakup pemilihan sasaran sosialisasi ini, target implementasi penyebarluasan, juga penelaahan risiko dan peluang, serta potensi dan kekurangan organisasi

b. Penetapan tindakan

Dalam tahap ini, juga bisa disebut menjadi penentuan langkah-langkah penyuluhan, dilakukan melalui beragam pendekatan, antara lain:

- 1) Pendidikan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum kepada kelompok pemilih awal, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilih awal mengenai fungsi penting generasi muda dalam proses demokratisasi. Kelompok muda dianggap sebagai fondasi utama keberhasilan suatu daerah, sehingga keterlibatan mereka dalam memilih pemimpin sangat krusial guna menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini ditargetkan pada Pelajar SMA/SMK dan warga pada umumnya yang baru berusia 17 tahun. Rekam jejak dan wawasan mereka tentang pemilihan umum masih sangat terbatas karena belum pernah mengambil bagian di pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, bagian ini dianggap krusial bagi disosialisasikan dikarenakan jumlah orang yang memberikan suara pemula dalam kuantitas terbilang signifikan.
- 2) Penyebarluasan informasi oleh Komisi Pemilihan Umum kepada kelompok Mahasiswa merupakan agenda tetap pihak komisi

pemilihan umum untuk memberi pendidikan kepada calon pemilih dalam lingkungan mahasiswa. Mahasiswa dilihat sebagai pembawa perubahan yang memiliki potensi mengedukasi masyarakat, mendorong partisipasi yang bijak dalam menentukan pilihan mereka. Melalui penyuluhan informasi ini, diharapkan mahasiswa bisa mengungkapkan pengetahuan kepada masyarakat, mengedukasi mereka dengan rela di proses pemilihan, juga memahami makna dari pemilih bijak..

c. Pengalokasian sumber daya

Pada pengalokasian aset, fokusnya kepada panduan teknis bagia parat pemilu dan panitia ad hoc. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan aktivitas yang bersifat mengedukasi dengan materi-materi yang diberikan, terutama terkait dengan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu untuk ikut serta secara aktif dalam menyosialisasikan aktivitas dan fase yang sudah atau hendak dilaksanakan.

### **2.2.2 Partisipasi Politik**

Komisi Pemilihan Umum, sebagai instansi pemerintah dengan tanggung jawab pokok melaksanakan pemilihan umum, terus berusaha untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan lancar dan akurat. Suksesnya pemilihan umum di Indonesia sebenarnya dapat diukur dengan sederhana, yaitu apabila pelaksanaannya memenuhi kriteria prinsip terbuka, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) dan kejujuran serta keadilan (JURDIL), serta mencapai peringkat partisipasi yang tinggi. Meskipun prasaja dalam konsepnya, tantangan yang kompleks adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pemilihan umum tersebut dapat terwujud. Apabila prinsip luber juga jurdil berhasil diterapkan secara efektif, maka parameter selanjutnya merupakan jumlah keterlibatan masyarakat (Supriyono 2020)

Berdasarkan pandangan (Supriyono 2020), partisipasi rakyat dalam pemilihan umum menjadi bentuk pengaruh terhadap keputusan politik, khususnya dalam pemilihan pemimpin. Tahap ini memiliki dampak besar terhadap arah kebijakan dan model yang akan diimplementasikan oleh pemerintah di masa mendatang. Masyarakat memiliki kepentingan besar untuk menyampaikan

aspirasi mereka kepada pemimpin yang diharapkan dapat membawa negara menuju perbaikan. Kumoroto, sebagaimana disampaikan oleh (Efriza 2012), mengemukakan bahwa keterlibatan mencakup tindakan kolektif atau individu menunjukkan interaksi saling menguntungkan antara pemerintah dan penduduknya.

Keterlibatan politik merupakan dimensi krusial di suatu sistem negeri berprinsip demokratis dan juga mencerminkan perkembangan politik yang bersifat kontemporer. Di berbagai negara di mana cara modernisasi politik berjalan baik, tingkat keterlibatan penduduk cenderung naik. Revitalisasi politik terkait dengan dimensi politis serta pemerintahan, dan keterlibatan politik pada intinya adalah aktivitas diterapkan oleh penduduk untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan. Tujuannya adalah memengaruhi proses penentuan keputusan yang dijalankan oleh negara.

Hasil beberapa definisi sehubungan dengan keterlibatan politik diatas dapat dijelaskan keterlibatan politik merujuk pada keterlibatan perseorangan atau kolektif sebagai anggota masyarakat dalam proses politis. Keterlibatan tersebut berwujud aktivitas konstruktif atau negatif dengan tujuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam ranah politik guna memengaruhi regulasi pemerintah. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) mempersempit pemahaman keterlibatan politik mereka dengan beberapa aspek. Pertama, melibatkan sejumlah aktivitas politik dan bukan hanya orientasi atau tindakan, yang berarti bukan termasuk unsur-unsur pandangan pribadi seperti pemahaman politik, ketertarikan pada politik, serta efektivitas politik. Fokus utamanya yaitu bagaimana pandangan dan emosi tersebut terkait melalui aktivitas politik. Selanjutnya, keterlibatan politik merujuk pada masyarakat umum, bukan pejabat administrasi publik yang bekerja profesional di kealihan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa fokus penelitian ini berada di partisipasi masyarakat umum. Ketiga, aktivitas yang ditujukan guna memengaruhi penetapan kebijakan pemerintah menyertakan upaya merayu atau memberikan tekanan pada pejabat pemerintah agar berbuat sesuai dengan metode khusus. Hal ini dapat mencakup usaha untuk menggagalkan keputusan atau bahkan mencoba memodifikasi elemen-elemen sistem politik atau kerangka keseluruhan struktur politik untuk memungkinkan pemerintah menjadi kian

responsif akan preferensi mereka. Keempat, melibatkan semua kegiatan yang bertujuan guna pemerintah dipengaruhi, tidak memperhatikan efek akhir atau dampak yang mungkin timbul. Kelima, keterlibatan politik dalam bentuk aktivitas yang berusaha memengaruhi pemerintah, baik secara tatap muka maupun tidak tatap muka. Dalam hal ini, partisipan dapat memengaruhi pemerintah secara langsung tanpa menggunakan perantara, atau melibatkan pihak lain yang dianggap mampu menyampaikan pesan kepada pemerintah.

### **2.2.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Pendapat (Surbakti 2007), jenis keterlibatan masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yakni:

- a. Keterlibatan yang intensif adalah aktivitas penduduk yang selalu menunjukkan mudah beradaptasi dengan berbagai tahap keputusan pemerintah. Artinya, ketika Individu memahami politik serta memiliki keyakinan yang tinggi terhadap pemerintah, keterlibatan politiknya berpotensi proaktif
- b. Keterlibatan yang ekstrim dan radikal adalah perilaku penduduk yang selalu menunjukkan peka pada beragam prosedur peraturan pemerintah. Perbedaan utama dengan partisipasi aktif adalah bahwa keterlibatan militan-radikal cenderung mengutamakan metode-metode tak biasa, termasuk taktik kebengisan. Pemahaman politik yang tinggi namun keyakinan rendah kepada pemerintah dapat menghasilkan partisipasi ekstremis.
- c. Keterlibatan yang kurang aktif adalah aktivitas penduduk yang memperkenankan atau patuh terhadap semua peraturan pemerintah tanpa mempersoalkan. Keterlibatan yang kurang aktif umumnya tidak memprotes aturan pemerintah. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dapat menghasilkan partisipasi kurang.
- d. Keikutsertaan tidak peduli adalah perilaku seseorang yang enggan tahu tentang seluruh kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Individu yang bersikap apatis umumnya mengalami rasa kekecewaan terhadap Pemerintah dan struktur politik yang sedang berlaku. Artinya,

jika individu memiliki derajat pemahaman politik dan keyakinan terhadap pemerintah yang kurang, sehingga keterlibatan politiknya mengarah ke sikap acuh atau tidak aktif.

#### **2.2.4 Fungsi Partisipasi Politik**

Penelitian Lane perihal keikutsertaan politik, disebutkan bahwa keterlibatan politik mempunyai empat peran:

- a. Berperan menjadi alat untuk mencari pemenuhan kepentingan ekonomi. Keterlibatan politik sering kali timbul dalam usaha untuk membuat panggung politik sebagai sarana guna menyelenggarakan upaya ekonomi atau mengincar manfaat materi.
- b. Berperan menjadi alat guna memenuhi keperluan adaptasi sosial. Ini melibatkan pemenuhan keperluan akan martabat diri, peningkatan kedudukan sosial, serta rasa terkemuka sebab berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin ternama juga berpengaruh. Partisipasi dalam aktivitas politik didorong oleh pergaulan luas dengan pejabat-pejabat tersebut.
- c. Berperan menjadi cara guna mengejar prinsip-prinsip tertentu. Individu terlibat dalam urusan politik dengan tujuan mencapai nilai-nilai spesifik, seperti memperoleh pekerjaan, proyek-proyek, tender, serta memperlancar perjalanan karier bagi para pejabat. Terutama bagi mereka yang terlibat dalam politik, biasanya politik dianggap sebagai alat untuk mencapai target pribadi.
- d. Berperan menjadi alat guna mengakomodasi keperluan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis spesifik, di mana keterlibatannya dalam ranah politik bertujuan memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai oleh orang lain, serta kepuasan dari pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **2.2.5 Pemilih Pemula**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada Bagian IV Pasal 19 ayat 1 dan 2, serta Pasal 20, menjelaskan bahwa pemilih awal merujuk kepada penduduk Indonesia yang telah mencapai usia tuju belas tahun atau lebih, termasuk yang

telah atau suda menikah, memiliki hak suara, serta tidak termasuk dalam kategori pemilih sesuai aturan undang-undang pemilihan umum.

Pemilih baru ini umumnya tergolong dalam kelompok siswa, mahasiswa, dan tenaga kerja muda yang perlu bimbingan serta pemahaman untuk mencapai perkembangan kapabilitas juga kemampuan superlatif sehingga mampu aktif berkedudukan di ranah politik.

#### **2.2.6 Karakteristik Pemilih Pemula**

Ciri-ciri pemilih awal, seperti yang diungkapkan oleh Firman (2014), adalah sebagai berikut:

- a. Belum pernah melibatkan diri dalam proses pemilihan atau memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menunjukkan kurangnya pengalaman dalam hal pemilihan.
- b. Memiliki tingkat antusiasme yang tinggi terkait dengan proses pemilihan.
- c. Kurang cenderung bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan terkait pemilihan.
- d. Sebagai pemilih muda, cenderung penuh dinamika antusiasme, jika belum terkendali dapat berdampak pada konflik sosial dalam konteks pemilihan.
- e. Tertarik untuk mengetahui yang tinggi, bersedia mengambil bagian, dan terlibat dalam proses pemilihan, walaupun dengan latar belakang belakang bervariasi.

Kebebasan untuk memberi pilihan dianggap sebagai hak asasi tiap orang atau penduduk negara perlu dipastikan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, seperti UU UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia dan UU No. 12/2005 tentang pengesahan hak sipil dan politik.

Di Indonesia, istilah "pemilih pemula" merujuk pada masyarakat yang dianggap sudah matang secara psikologis dalam proses pemilihan. Namun, kenyataannya di negara yang mengalami pertumbuhan, termasuk di Indonesia, banyak lagi anak muda serta orang dewasa yang tidak mencapai kedewasaan sepenuhnya secara psikologis. Oleh karena itu, emosi mereka cenderung kurang stabil dan mudah dipengaruhi serta goyah dalam pembentukan pendirian. Oleh karena itu, partai politik perlu memberikan perhatian khusus terhadap pemilih



pemula agar mau berpartisipasi dalam pemilu. Pemilih pemula memiliki alasan kuat untuk mencoblos, yaitu keyakinan bahwa dampak dari hasil pemilihan umum pada hidup mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk ikut memberikan suara.

### **2.2.7 Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah implementasi demokrasi yang dapat diartikan sebagai "proses guna membangun pemerintahan secara umum." Artinya, Pemilu merupakan manifestasi aspek utama dari "Demokrasi prosedural." Pemilihan umum secara substansial sesuai dengan jiwa demokratis, yang berarti pemerintahan dilaksanakan oleh warga, bersumber dari warga, dan untuk kepentingan warga. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat.

Menurut Harris G. Warren, pemilihan umum memberikan keleluasaan kepada penduduk agar menunjuk pejabat pemerintah serta menentukan arah yang diinginkan guna dilaksanakan pemerintah. Di proses pengambilan hasil ini, penduduk menetapkan hal apa yang sebetulnya ingin mereka miliki. A. Sudiharto juga mengungkapkan bahwa pemilihan umum merupakan alat demokrasi yang sangat vital serta menjadi manifestasi konkret dari partisipasi warga pada urusan negara.

Pemilihan umum diadakan sesuai dengan keputusan MPR RI Nomor III/MPR/1988, yang merujuk prinsip bahwasannya kedaulatan berada berada dalam kendali warga serta dijalankan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pemilu diatur untuk mengaktualisasikan independensi warga dengan sepenuhnya konkret dalam kehidupan bersama sebagai sebuah negara, dengan prinsip demokratis, terbuka, integritas, juga adil melalui pengumpulan suara yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, dan anonim.

Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan seperti berikut:

- a. Meningkatkan kestabilan sistem negara yang berprinsip demokratis.
- b. Mencapai pemilihan umum yang jujur dan bermoral.
- c. Memastikan keberlanjutan pengaturan sistem pemilihan umum.

- d. Menyediakan kejelasan hukum dan menghindari pengulangan dalam pemilihan umum.
- e. Menciptakan pemilihan umum yang berjalan dengan efisiensi dan efektivitas.

Tahun 2019, pemilu di Indonesia melibatkan pemilihan Pemilihan anggota DPR dan DPD diadakan bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum dilakukan dengan prinsip secara langsung, terbuka, independen, anonim, integritas, dan adil.

- a. Prinsip langsung mengindikasikan bahwa masyarakat menjadi pemilih memiliki kebebasan untuk menyampaikan suara langsung tanpa perantara.
- b. Prinsip umum menyatakan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat hukum memiliki hak suara, memeriksa bahwa setiap penduduk mempunyai hak setara tidak ada diskriminasi.
- c. Prinsip bebas menunjukkan bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan memberikan suara tanpa dipengaruhi atau dipaksa oleh partai politik.
- d. Prinsip rahasia menjamin kerahasiaan suara, di mana pemilih dapat memberikan mencoblos tanpa diketahui oleh pihak lain.
- e. Transparansi dalam konteks pemilu bahwa semua peserta dalam pemilihan harus menunjukkan perilaku/tindakan yang jujur setara ketentuan peraturan yang ditetapkan.
- f. Adil di penyelenggaraan pemilu berarti bahwa tiap pemilih serta calon pemilih harus diperlakukan secara seimbang dan tidak terkena manipulasi dari siapapun

Pemilih raya adalah tanda dimana warga negara melakukan kedaulatannya dengan berdikari serta independen untuk memutuskan pemimpin yang dikehendaki. Warga melakukan hal ini karena mereka tidak ingin membiarkan rezim yang sedang berkuasa untuk terus mempertahankan kedudukannya tanpa perubahan dalam pemerintahan, yang dapat menimbulkan kecemasan untuk mereka yang akan memperkuat demokratisasi dan mencegah bertransformasi jadi rezim feodal. Oleh karena itu, Maurice Duverger dengan tepat mengatakan bahwa di mana saja terdapat pemungutan suara yang independen dan tidak terikat, di

sanalah demokrasi hadir. Pada konteks ini, (Haris 1997) menguraikan peran pemilu menjadikan suatu wadah:

- a. Pengesahan politik, artinya dengan menggunakan suara rakyat, kelegalan pemerintahan kekuasaan dapat diperkuat.
- b. Peran wakil politik, yaitu dengan menggunakan suara rakyat dalam pemilihan umum, mereka menunjuk wakil yang dipercayai untuk memegang posisi di lembaga legislatif maupun eksekutif.
- c. Rotasi atau Pergantian Kelompok Pemimpin, artinya pemilihan umum memiliki hubungan dengan rotasi elit yang dianggap sebagai pemimpin yang menjalankan tugas dan mewakili kepentingan masyarakat.
- d. Fasilitas Pendidikan Politik, yang berarti pemilu bisa memberi pengajaran politik langsung juga transparan pada penduduk, dengan harapan warga jadi lebih menyadari keberadaan politik yang bersifat demokratis.

